POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (RPJMD 2021-2026)

Misi pada RPJMD

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Tujuan pada RPJMD

Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T1) (Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi)
Tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan (T2) (Ratio Gini)

Sasaran pada RPJMD

Sasaran 1 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S1) (Indikator : Nilai Sakip Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)
Sasaran 2 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (S2) Indikator : Indeks Desa Membangun)

IKU OPD (IMPACK)

Tujuan Renstra 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Sakip OPD
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Sasaran 3 : Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(Indikator : Nilai Sakip OPD; Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik) & Laporan Keuangan OPD sesuai SAP)

Tujuan Renstra 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perdesaan

Sasaran 4 : Meningkatnya Status Perkembangan Desa (Indikator : % Peningkatan Status Desa, % Pengentasan Desa Sangat Tertinggal, % Pengentasan Desa Tertinggal, Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri)

Eselon II (Outcome)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (*HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*)

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat (Indikator : ***Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (%)***)

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (Indikator : ***Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi (%)***)

PROGRAM PENATAAN DESA (Indikator : ***Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi (%)***)

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA (Indikator : ***Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa (%)***)

Eselon III (Intermediate Outcome)

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TK.Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA

FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA

Eselon IV (Output)

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
6. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
7. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
8. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangatan dan

1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam kabupaten
2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota

BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia ASN yang mengikuti Bimtek terkait Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pengadaan Mebel;
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

SEKRETARIAT

Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Pemgembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
5. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong

BIDANG PENGEMBANGAN, KERJASAMA, PEMBERDAYAAN ,

pemberhentian Kepala Desa
9. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
10. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
11. fasilitasi Manajemen Pemerintahan desa
12. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
13. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
14. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
15. Fasilitasi Penyusunan

BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA